BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variable yang akan kita teliti.

2.1.1 Retribusi daerah

2.1.1.1 Pengertian Retribusi daerah

Retribusi berdasarkan UU no.34/2000, sebagai berikut :

"Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan."

Retribusi Daerah menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010), sebagai berikut :

"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Menurut Sugianto (2007), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah :

"Retribusi Daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

2.1.1.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi Daerah Menurut Badriyyah Djula (2007), dibedakan atas tiga jenis yaitu :

(1) retribusi jasa dan usaha,
(2) retribusi jasa umum,
(3) retribusi perijinan tertentu.

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Jasa dan Usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersil. Jenisnya meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penitipan anak, retribusi penginapan, retribusi penyedotan khusus, retribusi tempat rekreasi, retribusi penyeberangan di atas air dan retribusi pengelolaan limbah cair serta retribusi penjualan produk usaha daerah.

(2) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis meliputi; retribusi pelayanan kesehatan dan kebersihan, retribusi pasar, retribusi pengganti alat cetak peta.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksud untuk pembinaan, pengaturan, dan pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana atau realitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan, menjaga kelestarian lingkungan meliputi retribusi izin penggunaan tanah, retribusi penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin pengambilan hasil hutan.

2.1.1.3 Penetapan Tarif Retribusi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

(1) Tarif retribusi jasa umum
(2) Tarif retribusi jasa usaha
(3) Tarif retribusi perizinan tertentu

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, danbiaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.1.4 Cara Perhitungan Retribusi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

Sumber: Undang-Undang No.34 Tahun 2000

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sebagai berikut :

"Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi."

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Kesit Bambang Prakosa (2004), sebagai berikut :

“Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan.”

2.1.2.2 Rumusan Dana Alokasi Umum (DAU)

Rumusan DAU menurut Adrian T.P Panggabean et.al, (1999), dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Rumusan alokasi DAU harus sederhana. Rumusan tidak boleh terlalu kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana, sehinggga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak adilan.
b. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variable, dimana jumlah variable yang dipakai menjadi relatifterlalu besar, dibandingkan dengan jumlah dana yang ingin dialokasikan.
c. Formula perlu ditelaah ulang setiap tiga tahun, untuk mencerminkan perubahan yang cukup mendasar dalam indicator-indikator obyektif yang mendasari rumusan.

2.1.2.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2004), Adapun cara menghitung dana alokasi umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Adapun rumus Penghitungan Dana Alokasi Umum Menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Sumber: UU No.33 Tahun 2004

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Iyandri (2009), sebagai berikut :

"Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana."

Belanja Daerah menurut IASC Framework, dalam Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana."

Belanja Daerah menurut Ainur Rofiq KKD (2007), sebagai berikut :

"Belanja Daerah Merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum."

Belanja Daerah menurut Deddi Nordiawan, Iswayudi sondi Putra, Maulidah Rahmawati (2007), sebagai berikut :

"Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umumNegara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah."

Belanja Daerah menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Belanja Daerah menurut Mardiasmo (2002), Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran, biasanya satu tahun.

2.1.3.2 Jenis-jenis Belanja daerah

Belanja daerah menurut Abdul Halim (2002), Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu:

(1) Belanja Administrasi Umum
(2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik
(3) Belanja Transfer
(4) Belanja Tak Tersangka
(5) Belanja Modal

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

(1). Belanja Administrasi Umum

Belanja Administrasi Umum menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas dan pelayanan publik."

Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan

Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Pegawai menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai."

Menurut Abdul Halim (2002), Belanja pegawai terdiri dari :

a. Biaya gaji dan tunjangan, yaitu biayayang dikeluarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai serta dewan. Contohnya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
b. Biaya perawatan dan pengobatan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran kesehatan pegawai dan dewan yang ditanggung pemerintah daerah. Contohnya biaya perawatan dan pengobatan lokal, biaya pengobatan lanjutan dalam daerah, dan biaya lanjutan luar daerah.
c. Biaya pengembangan sumber daya manusia, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Contohnya biaya beasiswa bantuan tugas belajar ikatan dinas, biaya kursus keterampilan dan *job training*, dan biaya riset dan studi (penulisan karya ilmiah).

Belanja Barang menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk peyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik."

Menurut Abdul Halim (2002), Belanja Barang terdiri atas:

a. Biaya bahan habis pakai, contohnya biaya alat listrik dan elektronik, biaya alat tulis, dan biaya gas.
b. Biaya jasa kantor, yaitu biaya yang berhubungan dengan pelayanan serta penunjang administrasi kantor. Contohnya biaya surat dan faks dan biaya pengiriman.
c. Biaya cetak dan pengadaan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencetak dan pengadaan. Contohnya barang cetakan dan fotokopi.
d. Biaya langganan, yaitu pengeluaran yang dibayar setelah manfaatnya dinikmati selama satu periode. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air.
e. Biaya pakaian dinas, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan pakaian dinas pegawai dan dewan. Contohnya biaya pakaian dinas, biaya pakaian upacara, dan biaya polisi/mentri/agen pamong praja.

Belanja Perjalanan Dinas menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

" Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik."

Menurut Abdul Halim (2002), Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas :

a. Biaya perjalanan dinas, yaitu pengeluaran perjalanan pegawai atau dewan yang menjalankan tugas. Contohnya biaya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
b. Biaya perjalanan pindah, yaitu pengeluaran perjalanan bagi pegawai yang pindah. Contohnya biaya perjalanan pindah dalam daerah dan biaya perjalanan pindah luar daerah.
c. Biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar. Contohnya biaya pemulangan dipensiun dalam daerah, biaya pemulangan dipensiun luar daaerah, dan biaya pemulanganpegawai yang gugur.

Belanja Pemeliharaan menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik."

Menurut Abdul Halim (2002), Biaya pemeliharaan terdiri atas:

a. Biaya pemeliharaan gedung kantor. Contohnya biaya pemeliharaan pintu dan jendela, biaya pemeliharaan atap, dan biaya pemeliharaan lantai.
b. Biaya pemeliharaan rumah dinas dan asrama. Contohnya sama dengan butir a diatas.
c. Biaya pemeliharaan *meubelair*, yaitu pengeluaran yang terkait dengan pemeliharaan *meubelair* kantor. Contohnya biaya pemeliharaan meja, biaya pemeliharaan kursi, dan biaya pemeliharaan lemari.
d. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan barang kantor yang apabila dioperasikan memerlukan operator. Contohnya biaya pemeliharaan AC, biaya pemeliharaan *sound system*, dan biaya pemeliharaan OHP.
e. Biaya pemeliharaan peralatan kantor, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan barang kantor yang apabila dioperasikan tidak memerlukan operator. Contohnya biaya pemeliharaan computer, biaya pemeliharaan mesin ketik, dan biaya pemeliharaan mesin fotokopi.
f. Biaya pemeliharaan mesin emplasment kantor. Contohnya biaya pemeliharaan pagar, biaya pemeliharaan taman, dan biaya pemeliharaan halaman parkir.

(2.) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik

Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik menurut Abdul Halim (2002:69), sebagai berikut :

"Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik merupakan semua pengeluaran pemerintah daeah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik."

Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Perjalanan
4. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pegawai menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Pegawai (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel."

Menurut Abdul Halim (2002), Belanja pegawai ini meliputi:

a. Honorarium, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran honor personel/orang yang secara langsung melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya honor bulanan, honor harian, dan honor proyek.
b. Upah lembur, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karena kerja diluar jam kerja.
c. Upah, yaitu pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai harian, yang meliputi upah harian tetap dan upah harian lepas.
d. Uang paket, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk anggota dan pimpinan dewan pada kegiatan siding dewan.
e. Insentif, yaitu pengeluaran guna pemberian uang perangsang atau insentif orang/personel yang bekerja untuk suatu kegiatan.

Belanja Barang menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja barang (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik). Merupakan pengeluaran pemerintah daerahuntuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik."

Menurut Abdul Halim (2002), Belanja barang ini terdiri atas :

a. Biaya sewa, yaitu pengeluaran untuk sewa tempat guna pelaksanaan suatu aktivitas. Contohnya biaya sewa gedung, biaya sewa pelabuhan, dan biaya sewa tempat pelelangan dan penjualan
b. Biaya bahan percontohan, yang hewan dan tanaman.

Belanja Barang menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Barang (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daaerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik." Biaya ini antara lain meliputi biaya perjalanan dinas dalam daerah dan biaya perjalanan dinas luar daerah.

Belanja Pemeliharaan menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Pemeliharaan (kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana, dan Prasarana Publik) merupakan pengeluaran pemerintah daaerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik."

Menurut Abdul Halim (2002), Biaya pemeliharaan ini terdiri atas :

a. Biaya pemeliharaan gedung pelayanan umum. Contohnya biaya biaya pemeliharaan gedung olah raga, biaya pemeliharaan wisma, biaya pemeliharaan gedung rumah sakit.
b. Biaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Contohnya biaya pemeliharaan jembatan timbang, biaya pemeliharaan jalan daerah propinsi, dan biaya pemeliharaan jembatan.
c. Biaya pemeliharaan kendaraan. Contohnya biaya pengujian kendaraan, biaya reparasi dan penggantian suku cadang, dan biaya pembelian ban.
d. Biaya pemeliharaan peralatan operasional, contohnya biaya pemeliharaan bengkel, biaya pemeliharaan peralatan pertanian, biaya pemeliharaan peralatan kesehatan.
e. Biaya pemeliharaan mesin. Contohnya biaya pemeliharaan mesin cetak, biaya pemeliharaan mesin pengeboran, dan biaya pemeliharaan mesin pabrik.

f. Biaya pemeliharaan perengkapan operasional. Contohnya biaya pemeliharaan perlengkapan kesehatan, biaya perlengkapan pendidikan, dan biaya pemeliharaan perlengkapan pertanian.
g. Biaya pemeliharaan sungai dan saluran/kanal.
h. Biaya pemeliharaan museum. Contohnya biaya pemeliharaan museum perjuangan, biaya pemeliharaan museum peninggalan purbakala, dan biaya pemeliharaan museum budaya.
i. Biaya pemeliharaan terminal. Contohnya biaya pemeliharaan terminal bus/truk, biaya pemeliharaan terminal peti kemas, dan biaya pemeliharaan terminal laut.
j. Biaya pemeliharaan kebun dan ternak. Contohnya biaya pemeliharaan kebun, biaya pemeliharaan ternak, dan biaya pemeliharaan kolam.
k. Biaya pemeliharaan taman. Contohnya biaya pemeliharaan taman rekreasi.
l. Biaya pemeliharaan emplasment. Contohnya biaya pemeliharaan *emplasment* rumah sakit dan biaya pemeliharaan *emplasment* bangunan.

(3). Belanja Transfer

Belanja Transfer menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut."

Menurut Abdul Halim (2002), kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

(4.) Belanja Tak Tersangka

Belanja Tak Tersangka menurut Abdul Halim (2002), sebagai berikut :

"Belanja Tak Tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa."

(5). Belanja Modal

Belanja Modal menurut Abdul Halim (2002),sebagai berikut :

"Belaja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan."

Menurut Abdul Halim (2002), Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulan.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

2.1.3.3 Cara Penghitungan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo, (2002) Belanja daerah dalam APBD terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang didefinisikan sebagai berikut ini :

Belanja Tidak Langsung
(BTL) = BP + BB + BS + BH + BBS + BBH + BK+ BTT

Sumber: Mardiasmo Tahun 2002

Belanja Langsung
(BL) = BP + BBJ + BM

Sumber: Mardiasmo Tahun 2002

Keterangan:
BTL = Belanja Tidak Langsung
BL = Belanja Langsung
BP = Belanja Pegawai
BB = Belanja Bunga

BS = Belanja Subsidi
BH = Belanja Hibah
BBS = Belanja Bantuan Sosial
BBH = Belanja Bagi Hasil
BK = Bantuan Keuangan
BTT = Belanja Tidak Terduga
BM = Belanja Modal
BBJ = Belanja Barang dan Jasa

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Kesit Bambang Prakosa1 (ISSN: 1410 – 2420)	2004	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli daerah terhadap Prediksi Belanja daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY	Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.	Variabel independen Tentang DAU Variabel dependen Belanja Daerah	Tidak meneliti PAD
2	Andra Eka Saputra, Ade Fatma Lubis, Idhar Yahya (ISSN 1907-428X)	2008	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara	Retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap total belanja daerah di Kabupaten Aceh Tenggara atau hipotesis 3 diterima.	Variabel dependen Belanja Daerah	Tidak meneliti kemampuan keuangan daerah dan pengaruhnya
3.	Mutiara Maimunah (ISSN 1693-8224) (K-ASPP 04)	2006	Flypaper Effect Pada dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra	hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua adalah diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). .	Variabel independen DAU Variabel dependen Belanja Daerah	Flaypaper Effect, PAD Lokasi di Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra.

4.	Diah Ayu K. & Arif Rahman (JAAI Vol.11 No. 1, Juni 2007: 67–80)	2007	Flypaper Effect Pada dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia	1. Melalui regresi berganda, diketahui bahwa PAD dan DAU secara bersamasama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. 2. Melalui uji t, diketahui bahwa *P value* t hitung yang diperoleh masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah.	Variabel independen Tentang DAU Variabel dependen Belanja Daerah	Tidak terdapat Flypaper Effect, PAD,
5	Mutiara Maimunah Dan Rusdi Akbar (JRAI, Volume 11 No.1, Januari 2008:37-51)	2008	Flypaper Effect Pada dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra	Dari nilai t statistik tampak bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD yaitu sebesar 4,499 pada alpha 5% (lampiran 1).	Variabel independen DAU Variabel dependen Belanja Daerah	Flaypaper Effect, PAD Lokasi di Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra.
6	Philippa Venning ISSN 1608-7143 OECD Journal on Budgeting Volume 2009/1 © OECD 2009	2009	*Impact of Budget Support on Accountabilities at the Local Level in Indonesia*	*In reality, an average of less than 10% of regional revenue comes from regional taxes and service fees.30 Most of the regional governments' revenue comes from the central government and is designed to reduce regional wealth disparities. This "balancing fund" is made up of three parts: i) shared revenue which includes property and income taxes imposed by the central government and revenue from natural resources; ii) a general allocation grant (not earmarked); and iii)*	Dana Alokasi Umum	Anggaran dan akuntabilitas

				special allocation grants (earmarked to finance areas of national priority) (World Bank, 2007, p. 119). The domestic accountability structures applying to grants are canvassed below, to help understand the local conditions into which budget support would be provided. Despite significant reforms, the World Bank states that, in practice, the regional budget process is not yet transparent or accountable.		
7	Badriyyah Djula (ISSN 1693-9034 Volume 4 No,3 3 sept 2007)	2007	Pengelolaan retribusi dan hubungannya dengan aspek-aspek penerimaan pemerintah daerah	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dan retribusi daerah di Kabupaten Bone Bolango	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli daerah
8	Omo Aregbeyen dan Taofik Mohammed Ibrahim *(European Journal of Social Sciences ISSN 1450-2267 Vol.27 No.3 (2012), pp. 374-380 © EuroJournals Publishing, Inc. 2012*	2012	*Testing the Revenue and Expenditure Nexus in Nigeria: An Application of the Bound Test Approach*	*The relationship between government expenditure and revenue can be categorized under three main contending hypotheses. The first hypothesis implies that taxation and spending decisions are made concurrently by the fiscal authorities. This also means that there is bi-directional relationship between government expenditures and revenues. This hypothesis is regarded as the fiscal synchronization hypothesis. The second is the tax-and spend*	Belanja daerah	Pendapatan daerah

				hypothesis. This hypothesis infers a unidirectional causality that runs from revenue to expenditure. In other words, since government revenue causes changes in government expenditure, government can reduce the size of its expenditure by controlling the tax revenue collected by government. The third hypothesis is the so-called spend-and-tax hypothesis. This hypothesis implies causality that runs from government expenditure to tax revenue. Expressed differently, government spending leads to changes in tax revenue.		
9	Muhammad Riduansyah (Makara Sosial Humaniora, Vol 7. No.2 Desember 2003	2003	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBN Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	Untuk kontribusi komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--terlihat bahwa kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan APBD Pemerintah daerah Kota Bogor.	Retribusi dan Belanja daerah	Pajak Daerah dan Otonomi Daerah

Tabel 2.1 diatas menunjukan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah penjelasan lebih jelas dari table diatas :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2004) bertujuan untuk a) mengetahui Dana Alokasi Umum, b) mengetahui Belanja Daerah, c) mengetahui

pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengan dan DIY. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus , dimana data yang dibutuhkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder di peroleh dari data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa barat. Sedangkan data primer di peroleh dari literature-literatur, buku-buku dan teori-teori yang ada di jurnal dan internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Tengan dan DIY oleh Kesit Bambang Prakosa menunjukan Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andra Eka Saputra, Ade Fatma Lubis dan Idhar Yahya (2008) bertujuan untuk a) mengetahui retribusi daearah b) mengetahui belanja daerah c) untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Andra Eka Saputra, dkk (2008), Hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi *log linear* dengan tingkat signifikan yang di syaratkan sebesar 5%. dengan demikian berarti retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap total belanja daerah di kabupaten Aceh Tenggara.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) bertujuan untuk a) mengetahui Dana Alokasi Umum, b) mengetahui Belanja Daerah, c) mengetahui

pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah ini menggunakan alat analisis yaitu regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*). Hasil analisis adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regersi sederhana dan berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap BD diterima.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu K dan Arif Rahman (2007) bertujuan untuk a) mengetahui Dana Alokasi Umum, b) mengetahui Belanja Daerah, c) mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi berganda (*multiple regression*). Dari hasil penelitian menyatakan bahwa variable DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah dan Rusdi akbar (2008) bertujuan untuk a) mengetahui Dana Alokasi Umum, b) mengetahui Belanja Daerah, c) mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. Dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat. Dari nilai *t* statistik tampak bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD yaitu sebesar 4,499 pada alpha 5%.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Philippa Venning (2009) *In reality, an average of less than 10% of regional revenue comes from regional taxes and service fees.30 Most of the regional governments' revenue comes from the central government and is designed to reduce regional wealth disparities. This "balancing fund" is made up of three parts: i) shared revenue which includes property and income taxes imposed by the central government and revenue from natural resources; ii) a general allocation grant (not earmarked); and iii) special allocation grants (earmarked to finance areas of national priority) (World Bank, 2007, p. 119). The domestic accountability structures applying to grants are canvassed below, to help understand the local conditions into which budget support would be provided. Despite significant reforms, the World Bank states that, in practice, the regional budget process is not yet transparent or accountable.*
7. Penelitian yang dilakukan oleh Badriyyah Djula (2007) bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan Retribusi daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Retribusi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Aspek-aspek penerimaan daerah.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Omo Aregbeyen dan Taofik Mohammed Ibrahim (2012) *The relationship between government expenditure and revenue can be categorized under three main contending hypotheses. The first hypothesis implies that taxation and spending decisions are made concurrently by the fiscal authorities. This also means that there is bi-directional relationship between*

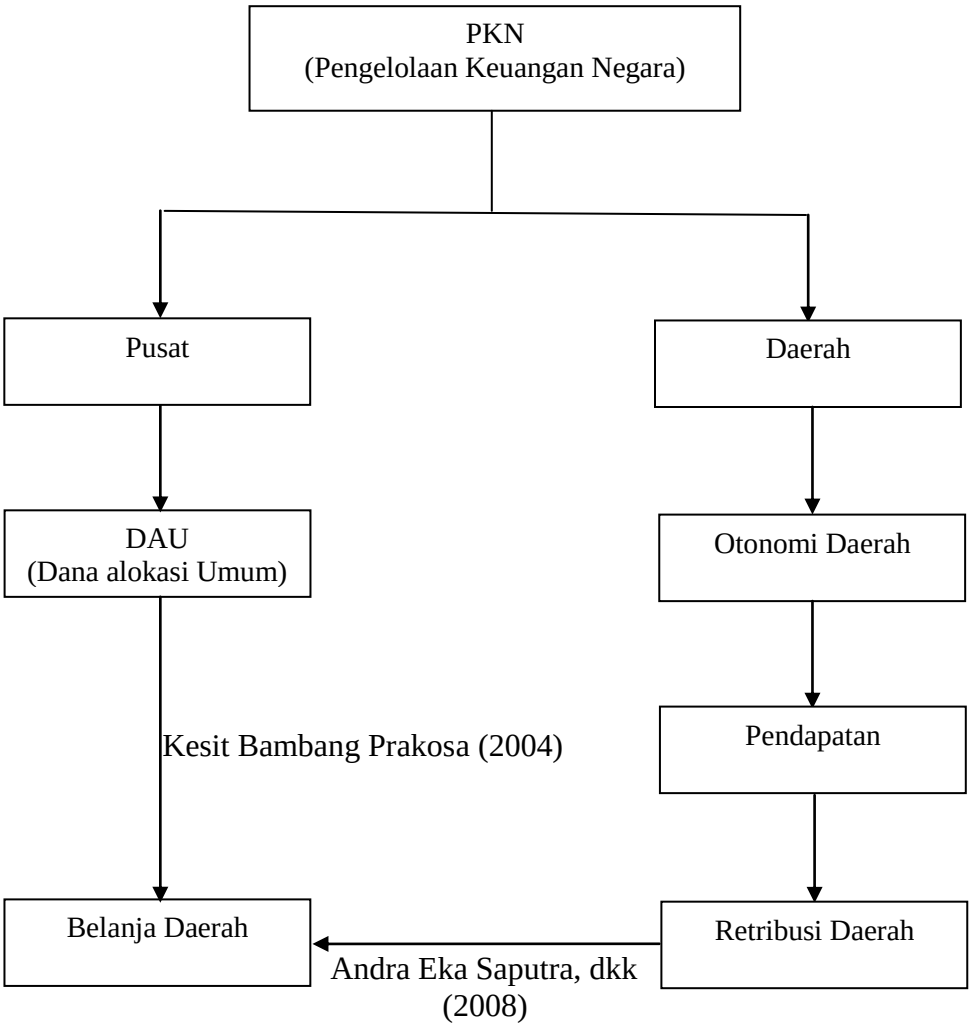
government expenditures and revenues. This hypothesis is regarded as the fiscal synchronization hypothesis. The second is the tax-and spend hypothesis. This hypothesis infers a unidirectional causality that runs from revenue to expenditure. In other words, since government revenue causes changes in government expenditure, government can reduce the size of its expenditure by controlling the tax revenue collected by government. The third hypothesis is the so-called spend-and-tax hypothesis. This hypothesis implies causality that runs from government expenditure to tax revenue. Expressed differently, government spending leads to changes in tax revenue.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Riduansyah (2003) bertujuan untuk mengetahui tentang Retribusi daerah di Kota Bogor, Berdasarkan hasil penelitian tersebut untuk komponen retribusi daerah terhadap total penerimaan APBD dalam kurun waktu tahun anggaran 1993/1994--2000 berkisar antara 8,36%--23,05%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 15,61 % dengan pertumbuhan per tahun 5,08%. Kontribusi retribusi terbesar terhadap total penerimaan APBD diberikan oleh retribusi pasar dan retribusi terminal. Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berawal dari Pengelolaan Keuangan Negara, yang bersumber dari APBN yang di berlakukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerataan keuangan daerah pemerintah pusat memberikan DAU kepada Pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah diantaranya untuk membiayai belanja daerah.

Dengan munculnya otonomi daerah maka daerah di berikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya otonomi daerah maka dapat mendorong daerah untuk melakukan proses pembangunan daerahnya. Untuk membiayai pembangunan tersebut pemerintah daerah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat yang berupa DAU, selain dari DAU pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan daerahnya, diantaranya dari retribusi daerah dari penerimaan retribusi daerah tersebut daerah dapat memenuhi belanja daerahnya.



Gambar 2.1
kerangka Pemikiran

2.2.1 Retribusi Daerah dengan Belanja Daerah

Andra Eka Saputra, dkk (2008), Hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi *log linear* dengan tingkat signifikan yang di syaratkan sebesar 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa logretri mempunyai *t*-hitung 2,555 dengan Sig.*t* = 0,016 pada α = 0,05 dan df = n-k =32-1 =31 diperoleh *t*-Tabel 1,697. Hasil tersebut menunjukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap total belanja daerah karena *t*-hitung (2,555) > *t*-Tabel (1,697) atau Sig. *t* (0,016) < α (0,05). Dari tabel diperoleh koefisien estimasi retribusi daerah adalah 0,378, dengan demikian berarti retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap total belanja daerah di kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari *P-value* 0,016 yang masih lebih kecil dari tingkat probabilitas yang disyaratkan sebesar 5% atau 0,05.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian Kusumayono (2004), yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran daerah. selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dickson & Yu (2000), tentang struktur pendapatan melalui pajak yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah.

2.2.2 Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2004), Secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi BJD, daya

prediksi DAU terhadap BJD tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunnjukkan telah terjadi *flypaper effect*..

Holzt-eakin et al (1985) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja Pemerintah daerah.

Sukriy dan Halim, (2004), Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali sebelumnya telah diteliti dan menghasilkan analisis bahwa ketika tidak digunakan tanpa *lag*, pengaruh PAD terhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap Belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD

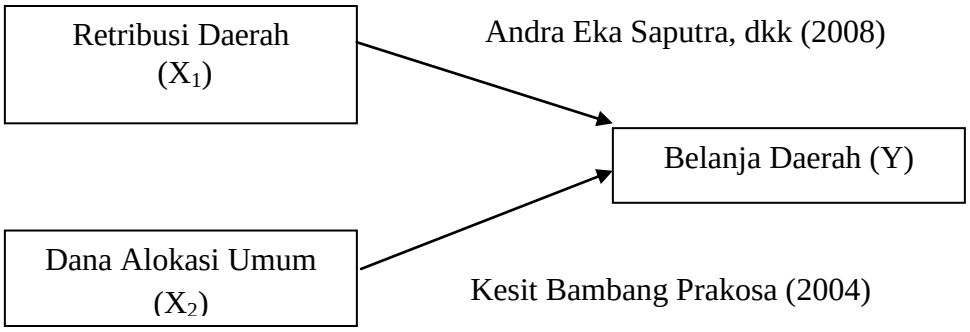
Mutiara maimunah (2006), Dari nilai *t statistic* tampak bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap BD yaitu sebesar 4,499 pada alpha 5% (lampiran 1). Hal ini bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula BD. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan *DAU berpengaruh positif terhadap BD* diterima, dan ini konsisten dengan pandangan Holtz-Eakin et al (1994) dan Sukriy dan Halim (2004).

Diah Ayu K & Arief Rahman (2007), Nilai t hitung untuk DAU pada derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0{,}05$) yaitu 84,01529564, sedangkan P Value t hitungnya yaitu 0. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa nilai P value untuk PAD lebih kecil daripada derajat kepercayaannya ($0<0{,}05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara individual DAU juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah.

Dari kerangka pemikiran diatas dapat diambil kerangka penelitian. Menurut Sugiono (2010) :

> "Pola pikir yang menunjukan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan."

Paradigma penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.2

Skema Paradigma Penelitian

2.3 HIPOTESIS

Menurut Sugiyono (2008), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian dibawah:

H1: Perubahan Retribusi Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami penurunan.

H2: Perubahan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan.

H3: Perubahan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami peningkatan

H4: Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

H5: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

H6: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Barat.